

## KINERJA EKSPOR UDANG INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT PASCA PEMBERLAKUAN *GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES* (GSP) TAHUN 2014 - 2019

Kesi Yovana<sup>1</sup> dan Varissa Adina<sup>2</sup>

Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

[kesiyovana@dsn.moestopo.ac.id](mailto:kesiyovana@dsn.moestopo.ac.id)

[varissa\\_adina@hotmail.com](mailto:varissa_adina@hotmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the Impact of US Policies Regarding the General Preference System for Indonesian Shrimp Exports to the United States for the period 2014 - 2019. The research method used is a qualitative method. The technique of collecting data is the library of literature consisting of books, journals and websites and interviews with relevant sources. In this research, the theory or concept used is Foreign Trade Policy. From the results of the study, it can be concluded that providing US GSP facilities to Indonesia can help win the competition for Indonesian shrimp that has an advantage in the United States market. The termination of the GSP facility caused the cost of Indonesian shrimp exports to increase, but did not have a direct impact on the volume of Indonesian shrimp exports to the United States*

**Keywords:** *Generalized System of Preferences, Indonesian Shrimp Exports, United States, Indonesia*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Dampak Kebijakan Amerika Serikat terkait *Generalized System of Preferences* Terhadap Ekspor Udang Indonesia ke Amerika Serikat Periode 2014 – 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan situs website serta wawancara kepada sumber-sumber terkait. Di dalam penelitian ini, teori atau konsep yang digunakan adalah Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas GSP Amerika Serikat terhadap Indonesia dapat dikatakan menguntungkan khususnya bagi komoditas udang Indonesia yang memiliki keunggulan di pasar Amerika Serikat. Penghentian fasilitas GSP menyebabkan *cost* ekspor udang Indonesia meningkat, namun tidak berdampak secara langsung terhadap volume ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat

**Kata Kunci:** *Generalized System of Preferences, Ekspor Udang Indonesia, Amerika Serikat, Indonesia*

### PENDAHULUAN

Dalam studi Ekonomi Politik Internasional, perdagangan adalah salah satu kunci sebuah interaksi antara dua negara atau lebih yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri setiap negara serta memaksimalkan keunggulan komparatifnya. Pada dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan kerjasama perdagangan yang merupakan sebuah hubungan kompleks suatu negara ke negara lain. Kegiatan perdagangan internasional tersebut meliputi ekspor dan impor. Perkembangan perdagangan yang semakin kompleks menuntut adanya

sebuah aturan atau hukum yang berbentuk tertulis dan berlaku secara universal, sehingga terbentuklah *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang lahir dengan tujuan untuk membuat suatu unifikasi hukum dibidang perdagangan internasional. Namun, karena terdapat kelemahan yang ada dalam GATT, kemudian hal tersebut diperbaiki melalui beberapa pertemuan. Salah satu pertemuan yang berhasil adalah Putaran Uruguay antara tahun 1986-1994. Pada putaran tersebut dicapai kesepakatan untuk membentuk sebuah lembaga perdagangan internasional *World Trade Organization (WTO)* (Firdaus, 2013)

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas *Most-Favored-Nation principle (MFN)* dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya (Direktoral Jenderal Kerjasama Multilateral). Berdasarkan prinsip MFN, beberapa pengecualian dapat diperbolehkan. Pengecualian tersebut, sebagian ada yang ditetapkan dalam pasal-pasal GATT itu sendiri, dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan-putusan dalam konversi GATT dan prinsip-prinsip GATT berdasarkan pasal XXV, salah satu pengecualian yang dimaksud adalah pemberian preferensi tarif oleh negara-negara maju kepada produk impor negara berkembang atau negara yang kurang beruntung (*Least Developed*) melalui fasilitas *Generalized System of Preferences* atau disebut juga dengan Sistem Preferensi Umum (Adolf, 2006) *Generalized System of Preferences* (GSP) merupakan kebijakan untuk memberikan keringanan bea masuk terhadap barang-barang impor tertentu dari negara-negara berkembang. Program GSP yang diterapkan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang mitra dagangnya ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974 untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dan dilaksanakan pada 1 Januari 1976. (United State Trade Representative, 2017, p. Guidebook) *Generalized System of Preferences* (GSP) Amerika Serikat yang diberlakukan sejak tahun 1976 sempat diberhentikan pada 2013 dan diberlakukan kembali pada Juni 2015. Setiap tahunnya, Pemerintah Amerika menerbitkan sebuah Panduan GSP, yang berisikan daftar negara penerima fasilitas serta daftar produk apa saja yang memperoleh fasilitas GSP. (Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2018)

Sejak Indonesia masuk sebagai anggota perdagangan dunia melalui

ratifikasi UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia / WTO, semenjak itu pula Indonesia mendapatkan salah satu keuntungan sebagai negara berkembang anggota WTO yang mendapatkan fasilitas preferensi tariff GSP dari negara-negara maju di dunia salah satunya Amerika Serikat. (Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2018). Amerika Serikat dan Indonesia melakukan pertemuan secara berkala berdasarkan *Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)* tahun 1996, yang dalam perjanjian tersebut Indonesia dan Amerika Serikat bekerja untuk mengatasi masalah bilateral dan mengoordinasikan masalah regional maupun multilateral. (United State Trade Representative) Namun, Indonesia baru menikmati fasilitas GSP pada tahun 1981, selain Indonesia negara ASEAN lainnya mendapatkan fasilitas ini seperti Thailand, Kamboja, Myanmar dan Philippina. (United State Trade Representative, 2017, p. Guidebook) Sektor perikanan memiliki peran strategis sebagai sektor utama pilar perekonomian nasional dan menjadi sumber peningkatan devisa negara dari sisi ekspor bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan. (Kristiana, 2015) Salah satu komoditas sektor perikanan yang menjadi kontributor ekspor terbesar Indonesia adalah Udang dan produk olahan udang. Beberapa negara tujuan ekspor udang dan produk olahan udang Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara anggota Uni Eropa. Dalam visi 2020 yang disusun pada tahun 2007 oleh *U.S. Department of Commerce*, pihak pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan beragam rekomendasi kebijakan dan panduan untuk konservasi perikanan yang bertujuan untuk menciptakan perikanan tangkap lestari dan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya. Beberapa poin penting yang terdapat dalam visi tersebut salah satunya adalah meningkatnya permintaan penduduk terhadap produk

makanan laut akan terus melebihi pasokan dalam negeri, sehingga perikanan internasional akan menjadi penting pada masa depan dan Amerika Serikat harus terlibat di dalamnya. Dalam poin tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat memandang produk perikanan dan kelautan sangat penting bagi perekonomian nasionalnya, sehingga Amerika Serikat masih dianggap sebagai pasar yang potensial bagi Indonesia yang mengandalkan komoditas perikanan sebagai ekspor utamanya. (Yaumidin, 2016).

Memiliki nilai ekonomi tinggi, udang menjadi produk andalan ekspor Indonesia. Selain memberi kontribusi devisa yang besar dan sebagai sumber penghasilan masyarakat pesisir Indonesia, komoditas ini juga menempatkan Indonesia sebagai negara produsen udang terbesar di ASEAN. Mencapai 77.000 Ton bernilai US\$ 938 Juta pada periode 2014 menjadikan Amerika Serikat sebagai negara importir terbesar komoditas udang Indonesia. (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia) Terdapat dua jenis udang unggulan ekspor Indonesia. Pertama, spesies udang *Vaname* (*Litopenaeus vannamei*). Udang ini dikembangkan dengan teknologi intensif, tahan terhadap penyakit dan diminati pasar Amerika Serikat. Kedua, spesies udang *windu* (*Penaeus monodon*) yang merupakan udang asli Indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara bersama dengan India dan juga Kazakhstan sebagai negara yang menghadapi evaluasi kelayakan penerima manfaat GSP. Namun pada awal 2019, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia masih diberikan kesempatan oleh Amerika Serikat untuk memenuhi ulang beberapa persyaratan yang diajukan untuk memperpanjang GSP tersebut, tak seperti India dan Kazakhstan yang diputuskan tak lagi menerima fasilitas tersebut. (CNN Indonesia, 2019). Kebijakan Amerika Serikat terkait dengan *Generalized System of Preferences (GSP)* berdampak terhadap

produk ekspor Indonesia khususnya yang komoditas ekspor yang termasuk dalam fasilitas bantuan perdagangan tersebut. Dinamika yang terjadi dengan GSP seperti diberhentikannya fasilitas tersebut pada 2013 dan diberlakukan kembali pada pertengahan 2015, hingga adanya peninjauan ulang dan pertimbangan penghapusan fasilitas GSP ke negara-negara penerima nya termasuk Indonesia akan berdampak terhadap komoditas ekspor Indonesia salah satu nya yaitu udang yang termasuk kedalam komoditas ekspor unggulan Indonesia khusus nya ke Amerika Serikat.

## KERANGKA ANALISIS

Untuk menganalisa “Dampak Kebijakan Amerika Serikat terkait *Generalized System of Preference (GSP)* terhadap Ekspor Udang Indonesia ke Amerika Serikat (2014- 2019)” maka penelitian ini akan menggunakan teori mengenai **Kebijakan Perdagangan Luar Negeri**.

Paweł Bożyk berpendapat, bahwa Kebijakan Perdagangan Luar Negeri mengarah pada kemampuan suatu negara untuk membuat suatu keputusan mengenai hubungan perdagangan luar negerinya. Kebijakan perdagangan luar negeri sejatinya dibuat dengan secara komprehensif dengan kata lain, mencakup hubungan perdagangan dengan negara luar dan juga hubungan internal ekonomi negara tersebut. Dimana kebijakan perdagangan luar negeri suatu negara nantinya dapat mempengaruhi kerjasama dengan negara lain. Kebijakan perdagangan luar negeri memberikan negara peluang untuk mempengaruhi hubungan ekonomi dengan negara lain. Kebijakan perdagangan luar negeri memiliki keseimbangan atas keuntungan dan rugi, dengan diambilnya kebijakan tertentu maka negara dapat meningkatkan keuntungannya atau bahkan mendapatkan kerugian sehingga kebijakan perdagangan luar negeri dapat menyebabkan perubahan dalam sentiment

sosial dan politik. Oleh karena itu, karakter dari kebijakan perdagangan luar negeri ini harus didasarkan pada keseimbangan dan manfaat tak hanya pada perekonomian, namun juga pada sosial dan politik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. kebijakan perdagangan luar negeri mengacu kepada pembentukan kebijakan oleh negara yang berhubungan dengan komoditas perdagangan dan perubahan yang terjadi dalam perdagangan internasional, termasuk dalam kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Dalam ruang lingkup kebijakan impor memiliki sasaran dalam jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.

Dalam jangka pendek, negara bisa membatasi impor dengan memberikan berbagai bentuk hambatan atau bahkan mengurangi berbagai macam hambatan yang ada sebelumnya. Mengenai tingkat bea masuk, kebijakan yang terkait dapat dibagi menjadi minimal dan maksimal. Bea masuk minimal ada bea yang berlaku pada perdagangan yang terjadi dengan negara-negara yang menikmati klausula *Most Favored Nation* (MFN) yang ada didalam *World Trade Organization* (WTO), sedangkan bea maksimal berlaku kepada negara yang belum menikmati MFN atau bergabung kedalam WTO, sehingga bea tersebut akan lebih besar dibanding dengan bea minimal yang berlaku bagi negara yang menikmati klausula MFN. Kebijakan *Generalized System of Preference* (GSP) adalah salah satu kebijakan perdagangan luar negeri yang diadopsi oleh negara-negara maju seperti salah satunya Amerika Serikat untuk mengurangi atau bahkan menghapus biaya bea masuk untuk barang-barang yang masuk kenegarannya yang berasal dari negara berkembang, dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu negara berkembang untuk dapat bersaing kedalam pasar internasional dan meringankan salah satu faktor yang menjadi penghambat ekspor negara berkembang untuk masuk ke pasar internasional yaitu biaya bea masuk suatu negara akan barang impor. (Bozyk, 2006).

Dampak kebijakan perdagangan luar negeri Amerika Serikat yaitu GSP terhadap ekspor Indonesia memungkinkan akan meringankan Indonesia dari adanya bea masuk yang ditetapkan oleh AS, dengan tidak dinikmatinya fasilitas GSP maka Indonesia harus membayar bea masuk kepada Amerika Serikat dan dinilai akan mengganggu daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS. Hal ini berkaitan dengan teori kebijakan perdagangan luar negeri yang menjelaskan bahwa kebijakan perdagangan luar negeri mencakup hubungan perdagangan atau perekonomian dengan negara lain yang merupakan mitra dagangnya, sehingga dapat mempengaruhi perdagangan atau perekonomian negara mitranya. Dengan adanya penerapan kebijakan perdagangan seperti fasilitas GSP akan berdampak kepada adanya perlakuan timbal balik dari perdagangan internasional antara negara mitra., seperti Indonesia yang menikmati fasilitas GSP dari AS harus membuka pasarnya untuk beberapa produk ekspor AS ke Indonesia. Dalam sektor ekspor produk perikanan dan kelautan yaitu komoditas udang memiliki banyak permintaan dari AS dan menjadi salah satu produk ekspor Indonesia yang menikmati GSP. Sehingga dalam praktik GSP khususnya periode 2014 – 2019 tersebut memiliki dampak untuk produk ekspor udang Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai latar belakang sosial dan hubungan yang terdapat dalam penelitian. Variabel dari fenomena yang akan diteliti adalah “Dampak Kebijakan Amerika Serikat terkait *Generalized System of Preferences* (GSP) Terhadap Ekspor Udang Indonesia ke Amerika Serikat”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan

studi kepustakaan dan teknik wawancara. Studi kepustakaan adalah dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang membahas topik yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, sedangkan teknik wawancara adalah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menguasai tema yang sedang dibahas.

## PEMBAHASAN

Indonesia telah memiliki hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Berbagai kerjasama terbentuk dalam hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat baik kerjasama bilateral yang dimana dalam hal tersebut hanya terlibat dua negara saja, dan kerjasama multilateral contohnya negara Indonesia dengan anggota ASEAN. Berbagai kerjasama terbentuk baik dalam perekonomian, pertahanan, dan investasi. Kawasan Amerika merupakan sebuah kawasan yang potensial dan menjanjikan sebagai mitra Indonesia, karena didalamnya terdapat negara-negara yang sudah sangat maju perekonomiannya seperti Amerika Serikat yang merupakan pasar tradisional bagi produk ekspor Indonesia. Dalam melakukan perdagangan dengan negara mitra, Amerika Serikat (AS) memiliki program *Generalized System Preference* (GSP). Program GSP ditujukan untuk negara-negara berkembang dan *Least-Developed Countries* (LDCs) dengan cara memberikan pembebasan bea masuk di AS dengan syarat antara lain negara penerima GSP harus dapat memberikan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hak-hak pekerja. Sesuai dengan ketentuan, GSPAS mulai diberlakukan pada tahun 1975 dan diperbaharui setiap 10 tahun sekali. Program GSP AS dimulai pada tanggal 1 Januari 1976 berdasarkan Undang-Undang Perdagangan AS (Trade Act) tahun 1974. Dalam pelaksanaannya, program GSP AS telah beberapa kali diperpanjang dan terakhir diperpanjang hingga 31 Desember 2017.

Dinamika pemberian GSP Amerika Serikat terhadap Indonesia ini dimulai pada tahun 2013 ketika masa pemerintahan Presiden Barrack Obama, fasilitas GSP sempat diberhentikan dengan alasan adanya dinamika politik Kongres Amerika Serikat sehingga hal tersebut juga berdampak kepada pemberhentian pemberian fasilitas GSP kepada Indonesia. Selama pemberhentian fasilitas GSP oleh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia berupaya melakukan respon ke Amerika Serikat melalui pertemuan – pertemuan negosiasi serta menunjukkan bukti bahwa Indonesia masih layak mendapat GSP. Selama pemerintah melakukan diplomasi serta pendekatan secara bilateral ke Amerika Serikat, Kementerian Perdagangan RI memberikan mandat kepada seluruh eksportir untuk menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) guna tetap melakukan prosedur ekspor secara normal dan tetap mengisi *form A* untuk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Selama masa pengiriman ekspor normal ke Amerika Serikat berdasarkan data kementerian perdagangan RI, total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat selama tahun 2014 mencapai US\$ 19,4 Miliar yang meningkat 0,5% dari capaian 2013 namun tidak bertahan lama, karena beberapa bulan kemudian mengalami penurunan sebesar US\$ 6,4 miliar (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2015).

Beberapa upaya dilakukan saat terjadi kekosongan tidak mendapatkan fasilitas tersebut, Indonesia melakukan sejumlah hal negosiasi dan melakukan perbaikan dengan mencoba serius dalam menangani kasus – kasus perdagangan yang menimpa Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri membutuhkan sebuah proses politik yang panjang di Kongres AS. Tidak hanya Indonesia saja yang mempertahankan fasilitas GSP, namun, bagi para pengusaha importir Amerika Serikat ternyata juga membutuhkan fasilitas tersebut agar usaha mereka memproduksi dari pabrikan tetap berjalan.

Hingga pada akhirnya desakan terjadi ke pemerintahan Amerika Serikat dan Senat pun menyetujui agar Presiden Obama menandatangani peraturan hukum baru yang menyatakan bahwa program GSP AS ditetapkan untuk mulai berlaku lagi pada 29 Juni 2015 dan akan berlaku sampai 31 Desember 2017 (American Chamber of Commerce in Indonesia, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 mencatat Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan sebesar USD 9,7M miliar atau. Dua negara penyumbang surplus terbesar adalah AS dan India. Namun Defisit neraca perdagangan yang dialami oleh Amerika Serikat semakin meningkat dengan negara yang sekarang menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. AS berusaha untuk mengurangi defisitnya dengan mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Pada masa rezim Presiden Donald Trump, terdapat beberapa hal yang menjadikan pertimbangan Amerika Serikat untuk mengevaluasi fasilitas GSP terhadap Indonesia, yaitu karena adanya defisit neraca perdagangan antara Amerika Serikat terhadap Indonesia, adanya kebijakan keuangan yaitu Gerbang Pembayaran Tunai (GPN) dan adanya berbagai hambatan investasi dan perdagangan Amerika Serikat di Indonesia.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, kepemimpinan Donald Trump akan memengaruhi hubungan AS dan Indonesia. Kebijakan Trump akan lebih fokus untuk penguatan industri dalam negeri. Kebijakan ini akan berdampak besar terhadap cara Amerika menjalankan kepentingan bisnisnya dengan seluruh negara dunia. Tidak seimbang neraca perdagangan Amerika dengan Indonesia membuat Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan protektif terhadap Indonesia dengan meninjau kembali fasilitas GSP. Di sisi lain, Indonesia mengimpor produk pertanian senilai 1,78 miliar Dolar Amerika Serikat dari AS pada tahun 2016, naik 31,63 persen tahun-ke-tahun dibandingkan

dengan 1,35 miliar Dolar Amerika Serikat pada tahun 2015. Dan diikuti oleh makanan dan produk-produk sejenis dengan harga 773,59 miliar Dolar Amerika Serikat pada tahun 2016, 5,32 persen lebih tinggi tahun-ke-tahun dari 734,51 miliar Dolar Amerika Serikat pada 2015. Sementara itu, Shinta Kamdani, kepala hubungan internasional dan investasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan pengusaha lokal menyadari bahwa ratusan komoditi saat ini sedang dalam tinjauan GSP AS, termasuk kapas, kayu lapis, dan produk pertanian. Indonesia dinilai akan kehilangan tren surplus perdagangan jika AS menghentikan GSP terhadap Indonesia. Hal ini dikarenakan produk-produk Indonesia akan dikenakan tarif yang lebih tinggi (The Straits Times, 2018) Di samping melakukan review atas kelayakan Indonesia mendapatkan fasilitas GSP, Amerika juga melakukan evaluasi terhadap 124 produk dari Indonesia seperti tekstil, produk hasil hutan, kapas, dan beberapa hasil pertanian dan perikanan, seperti udang dan kepiting. (Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2018). Pemerintah Indonesia terus melakukan diplomasi dan negosiasi kepada Perwakilan Dagang Amerika Serikat / USTR terkait dengan peninjauan ulang fasilitas GSP yang diberikan Amerika Serikat untuk Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan Indonesia dalam menanggapi peninjauan ulang fasilitas GSP Amerika Serikat terhadap Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump adalah salah satunya dengan mengirimkan Submisi dalam menanggapi peninjauan ulang yang dilakukan kepada produk-produk ekspor Indonesia atau disebut juga Product Review yang biasanya dilakukan setiap tahunnya. Submisi ini merupakan surat, yang mencakup data-data atas pembelaan produk ekspor yang di tinjau ulang, dalam submisi tersebut juga bisa mencakup dukungan-dukungan dari pengusaha importir produk ekspor Indonesia yang ditinjau ulang.

Komoditas udang merupakan salah satu komoditas sektor perikanan yang bernilai ekonomi tinggi. Jumlah ekspor udang Indonesia masih tergolong fuktuatif, namun udang tetap menjadi salah satu komoditas andalan ekspor perikanan Indonesia dengan pangsa pasar manca negara yang luas. Komoditas udang mendominasi lebih dari 40 persen hasil perikanan untuk ekspor, di mana Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa menjadi negara tujuan utama ekspor. Komoditas ekspor kelautan dan perikanan Indonesia menjadi salah satu komoditas yang mendapatkan fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP) dari Amerika Serikat. Komoditas ini merupakan salah satu yang paling cepat membawa angin segar pada ekspor Indonesia karena tindakan tegas yang dilakukan oleh menteri perikanan dan kelautan. Adapun alasan disetujuinya Indonesia untuk menerima Skema GSP ini lantaran pihak Parlemen dan Pemerintah Amerika Serikat merasa terkesan dengan langkah tegas Menteri Susi dalam memberantas penangkapan ikan ilegal atau *illegal fishing*. Di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan, sektor perikanan Indonesia mendapatkan angin segar untuk ekspor ke pasar Amerika Serikat setelah Presiden Barack Obama dengan persetujuan Senat Amerika Serikat menandatangani pembaharuan dan perpanjangan skema GSP. Para eksportir tetap harus menjaga kualitas dan mutu produk perikanan serta memperhatikan aspek-aspek kelestarian sumber daya perikanan dan aspek social seperti yang ditetapkan oleh otoritas Amerika Serikat. Mengingat Amerika Serikat cukup ketat dalam menerapkan berbagai persyaratan untuk produk yang

diimpornya (Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2015).

Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar untuk komoditas udang asal Indonesia dengan komposisi hampir 60 persen dari total ekspor udang Indonesia. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat Amerika Serikat yang semakin tinggi dan cenderung konsumtif apalagi adanya himbauan dari *The US Food and Drug Administration* (FDA) dan *US Environmental Protection Agency* (EPA) kepada masyarakat Amerika Serikat untuk lebih mengonsumsi ikan, terutama untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan anak-anak sehingga membuat permintaan ekspor udang Indonesia amat diminati. (Aristiyani, 2017). Hal tersebut sesuai dengan visi Amerika Serikat 2020 yang disusun pada tahun 2007 oleh *U.S. Department of Commerce*, pihak pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan beragam rekomendasi kebijakan dan panduan untuk konservasi perikanan yang bertujuan untuk menciptakan perikanan tangkap lestari dan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya. Terdapat dua jenis udang unggulan ekspor Indonesia. Pertama, spesies udang *Vaname* (*Litopenaeus vannamei*). Udang ini dikembangkan dengan teknologi intensif, tahan terhadap penyakit dan diminati pasar Amerika Serikat. Kedua, spesies udang *windu* (*Penaeus monodon*) yang merupakan udang asli Indonesia. Isu utama produk udang adalah munculnya penyakit *White Feces Syndrome* dan *Enterocytozoon Hepatopenaei* (EHP) yang berdampak pada menurunnya produksi udang sehingga harga udang meningkat sejalan dengan permintaan yang tinggi.

TAHUN	VOLUME (Ribu Ton)	NILAI (Juta US\$)
2013	62.64	664.79
2014	82.49	982.22
2015	79.52	716.81
2016	93.04	872.03
2017	98.95	977.74
2018	102.69	917.68
2019	72.28	595.24

Sumber: Kementerian Perdagangan RI

Pada 2013 ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat mengalami peningkatan, walaupun dalam periode tersebut Indonesia sedang tidak menikmati fasilitas GSP akibat adanya penghapusan fasilitas gsp Amerika Serikat kepada negara-negara penerima nya, pada tahun 2013 hingga 2015 Indonesia harus membayar tariff atas ekspor nya salah satunya ekspor udang ke Amerika Serikat menggunakan surat keterangan asal. Namun hal tersebut tidak begitu berdampak kepada performa ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang tahun 2013 hingga 2014 baik dari sisi volume maupun nilai, menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pengusaha / perusahaan eksportir melakukan ekspor sudah ada perjanjian terlebih dahulu mengenai jumlah udang yang akan di ekspor. Namun penurunan volume ekspor ke Amerika Serikat bisa saja terjadi jika produk udang yang di ekspor tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki Amerika Serikat yang terdapat dalam SIMP (*Seafood Import Monitoring Program*) sehingga produk udang tersebut dialihkan ekspor nya ke negara lain seperti contohnya ke Afrika atau Amerika Utara. Pada tahun 2017 – 2018 terjadi peningkatan volume ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat, menurut Asosiasi hal tersebut terjadi karena permintaan yang banyak di pasar Amerika Serikat akan udang Indonesia. Karena udang asal Indonesia sangat terkenal dan diminati oleh Amerika Serikat, melihat minat yang tinggi di pasar Amerika Serikat membuat produsen udang Indonesia meningkatkan

produksi udang tersebut. Namun pada periode tersebut, terjadi penurunan dalam nilai ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya dollar terhadap rupiah dibanding periode sebelumnya.

Menurut AP5I, untuk besarnya volume udang yang di ekspor oleh pengusaha / perusahaan eksportir udang Indonesia biasanya ditentukan oleh sebuah kontrak atau perjanjian antara pengusaha / perusahaan pengeksportir dengan mitra dagangnya (importir) di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *over production* dalam komoditas udang tersebut. Selain itu, produksi atau pengembangan udang yang akan di ekspor tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengembangannya, sehingga sering kali importir dari Amerika Serikat harus melakukan pemesanan terlebih dahulu atas jumlah udang yang ingin di impor dari Indonesia. Peminat udang Indonesia di Amerika Serikat sangat besar, maka sering kali pengimpor dari Amerika Serikat meminta jumlah yang banyak atas udang produksi Indonesia . Namun, kendala yang dimiliki oleh peternak / pengembang udang ekspor tersebut adalah kendala dalam bahan baku sehingga pengusaha / perusahaan eksportir udang Indonesia sering kali tidak dapat memenuhi jumlah permintaan yang besar akan produk udang tersebut dari Amerika Serikat (AP5I). Selain kendala dalam bahan baku untuk mengembangkan udang tersebut, peternak dan pengusaha udang sering kali mendapat hambatan dan

tantangan dari regulasi yang berlaku di Indonesia. Tantangan tersebut datang dari regulasi mengenai impor udang yang diterapkan oleh Indonesia, dalam regulasi tersebut Indonesia melarang untuk melakukan impor produk udang dari negara lain. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pengusaha udang, karena sering kali terjadi penolakan atas udang yang di ekspor ke Amerika Serikat karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh AS, kemudian udang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi ke Indonesia karena jika dikembalikan lagi maka akan dianggap bahwa telah melakukan impor udang dari negara lain. Sehingga pengusaha harus mengalihkan produk udang tersebut ke negara lain agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar.

Penggunaan fasilitas GSP Amerika Serikat oleh pengusaha eksportir udang masih belum maksimal, sehingga masih ada beberapa pengusaha eksportir udang ke Amerika Serikat yang belum memanfaatkan fasilitas GSP tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai manfaat penggunaan GSP dikalangan pengusaha eksportir udang, selain itu beberapa pengusaha eksportir udang merasa bahwa dengan tidak menggunakan GSP mereka masih tetap bisa melakukan ekspor produk udang ke Indonesia karena mereka sudah memiliki partner pengusaha / perusahaan importir di Amerika Serikat dan sudah memiliki perjanjian harga sebelumnya walaupun keuntungan yang didapat mungkin tidak akan sebesar jika mereka menggunakan fasilitas GSP. Namun bagi Indonesia, fasilitas GSP dari Amerika Serikat ini sangat menguntungkan dan pemanfaatan GSP harus dimaksimalkan selagi tidak melebihi *Competitive Need Limit* (CNL) yang ditetapkan oleh GSP. Indonesia menikmati fasilitas GSP dari Amerika Serikat sejak tahun 1981, namun seiring dengan berjalannya fasilitas tersebut banyak dinamika yang terjadi seperti pada tahun 2013 – 2015 di masa pemerintahan Presiden Obama fasilitas GSP Amerika Serikat diberhentikan bagi semua negara

berkembang yang menikmati fasilitas tersebut. Penghentian pada 2013 – 2015 tersebut salah satunya di latar belakang oleh salah satunya permasalahan HAKI, sehingga pada masa penghentian tersebut Indonesia harus membayar bea masuk kepada Amerika Serikat menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) sehingga hal tersebut berdampak kepada cost produk ekspor Indonesia salah satunya adalah ekspor komoditas udang yang sebelum penghentian fasilitas GSP terus meningkat permintaannya, dengan meningkatnya cost ekspor udang Indonesia ke pasar Amerika Serikat tidak berdampak langsung terhadap volume ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat satu tahun setelah penghentian tersebut, namun terasa satu tahun setelahnya bahwa volume dan nilai ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat menurun.

*Generalized System of Preferences* Amerika Serikat kepada Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengusaha / perusahaan eksportir Indonesia. Hal tersebut karena kurangnya sosialisasi mengenai manfaat penggunaan fasilitas GSP dan juga proses atau persyaratan penggunaan GSP masih dirasa rumit untuk dipenuhi. Fasilitas GSP Amerika Serikat bagi Indonesia dirasa sangat penting, walaupun secara perdagangan Indonesia bisa beralih ke negara-negara lain yang memiliki akses pasar selain Amerika Serikat. Namun terdapat beberapa faktor mengapa Amerika Serikat menjadi prioritas perdagangan Indonesia dan Indonesia terus mempertahankan status penikmat GSP tersebut, hal itu disebabkan karena dengan adanya GSP ini diharapkan hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Indonesia akan semakin kuat, selain itu Amerika Serikat merupakan negara hegemony sehingga dengan diperkuatnya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dengan kerangka GSP ini diharapkan kedepannya akan mendorong berbagai kedekatan lainnya selain dalam bidang ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan

penghentian fasilitas GSP Amerika Serikat kepada Indonesia tersebut baru berjalan selama setahun sehingga belum begitu terasa ataupun terlihat dampaknya bagi produk ekspor udang Indonesia yang di ekspor ke pasar Amerika Serikat. Namun pada tahun 2014 – 2015 performa ekspor udang Indonesia ke pasar Amerika Serikat mulai mengalami penurunan, baik dalam sisi volum dan juga nilai. Hal tersebut disebabkan karena dampak dari penghentian fasilitas GSP tersebut mulai terasa, dengan tidak adanya fasilitas GSP maka nilai produk udang Indonesia di pasar Amerika Serikat meningkat, hal ini kemudian menyebabkan turunnya permintaan akan produk udang Indonesia di pasar Amerika Serikat karena Indonesia juga bersaing dengan beberapa negara pengekspor udang di pasar Amerika Serikat, sehingga volume ekspor udang Indonesia menurun begitu juga dengan nilai ekspor nya. Selain karena faktor GSP tersebut, menurut Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia / AP5I, hal tersebut bisa juga disebabkan oleh menurunnya produksi udang dalam negeri, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan importir / distributor di negara tujuan ekspor yaitu Amerika Serikat.

Setelah diberlakukan kembali fasilitas GSP Amerika Serikat kepada salah satunya Indonesia pada tahun 2015, performa ekspor udang kembali pulih, terlihat dari meningkatnya volum dan juga nilai ekspor udang Indonesia pada tahun 2015 hingga 2017. Namun sempat terjadi perubahan yang fluktuatif dalam volume dan nilai ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat yang terjadi sepanjang periode 2017 – 2019. Menurut data yang diolah dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Republik Indonesia, pada 2017 hingga 2018 terjadi peningkatan dalam volum ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat, namun dalam sisi nilai mengalami penurunan. Begitu juga pada 2018 hingga kuarta I 2019 terjadi penurunan baik dalam sisi volume

dan nilai ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat sehingga, pemberhentian fasilitas GSP oleh Amerika Serikat kepada Indonesia dalam komoditas udang pada tahun 2013 – 2015 menyebabkan biaya ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena selama masa pemberhentian tersebut Indonesia harus membayar biaya ekspor ke Amerika Serikat, hal tersebut yang kemudian berdampak juga kepada turunnya volume dan nilai ekspor komoditas ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Namun, penghentian fasilitas GSP tersebut tidak begitu berdampak kepada volum ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat pada periode 2013 – 2014 karena masa pemberhentian fasilitas tersebut baru setahun berjalan sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap volume maupun nilai ekspor udang Indonesia.

Menurut Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), turunnya nilai ekspor udang Indonesia bisa saja dipengaruhi oleh naik atau turunnya rupiah terhadap dollar. Namun untuk volume ekspor, perwakilan asosiasi menyampaikan bahwa selama ekspor produk udang Indonesia ke Amerika Serikat cenderung terus meningkat karena sebelum pengusaha / perusahaan eksportir melakukan ekspor sudah ada perjanjian terlebih dahulu mengenai jumlah udang yang akan di ekspor. Namun penurunan volume ekspor ke Amerika Serikat bisa saja terjadi jika produk udang yang di ekspor tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki Amerika Serikat yang terdapat dalam SIMP (*Seafood Import Monitoring Program*) sehingga produk udang tersebut dialihkan ekspor nya ke negara lain seperti contohnya ke Afrika atau Amerika Utara. Pada tahun 2017 – 2018 terjadi peningkatan volume ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat, menurut Asosiasi hal tersebut terjadi karena permintaan yang banyak di pasar Amerika Serikat akan udang Indonesia. Karena udang asal Indonesia sangat terkenal dan diminati oleh

Amerika Serikat, melihat minat yang tinggi di pasar Amerika Serikat membuat produsen udang Indonesia meningkatkan produksi udang tersebut. Namun pada periode tersebut, terjadi penurunan dalam nilai ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya dollar terhadap rupiah dibanding periode sebelumnya.

Menurut AP5I, untuk besarnya volume udang yang di ekspor oleh pengusaha / perusahaan eksportir udang Indonesia biasanya ditentukan oleh sebuah kontrak atau perjanjian antara pengusaha / perusahaan pengeksportir dengan mitra dagangnya (importir) di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *over production* dalam komoditas udang tersebut. Selain itu, produksi atau pengembangan udang yang akan di ekspor tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengembangannya, sehingga sering kali importir dari Amerika Serikat harus melakukan pemesanan terlebih dahulu atas jumlah udang yang ingin di impor dari Indonesia. Peminat udang Indonesia di Amerika Serikat sangat besar, maka sering kali pengimpor dari Amerika Serikat meminta jumlah yang banyak atas udang produksi Indonesia. Namun, kendala yang dimiliki oleh peternak / pengembang udang ekspor tersebut adalah kendala dalam bahan baku sehingga pengusaha / perusahaan eksportir udang Indonesia sering kali tidak dapat memenuhi jumlah permintaan yang besar akan produk udang tersebut dari Amerika Serikat (AP5I).

Selain kendala dalam bahan baku untuk mengembangkan udang tersebut, peternak dan pengusaha udang sering kali mendapat hambatan dan tantangan dari regulasi yang berlaku di Indonesia. Tantangan tersebut datang dari regulasi mengenai impor udang yang diterapkan oleh Indonesia, dalam regulasi tersebut Indonesia melarang untuk melakukan impor produk udang dari negara lain. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pengusaha udang, karena sering kali terjadi penolakan

atas udang yang di ekspor ke Amerika Serikat karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh AS, kemudian udang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi ke Indonesia karena jika dikembalikan lagi maka akan dianggap bahwa telah melakukan impor udang dari negara lain. Sehingga pengusaha harus mengalihkan produk udang tersebut ke negara lain agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Penggunaan fasilitas GSP Amerika Serikat oleh pengusaha eksportir udang masih belum maksimal, sehingga masih ada beberapa pengusaha eksportir udang ke Amerika Serikat yang belum memanfaatkan fasilitas GSP tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai manfaat penggunaan GSP dikalangan pengusaha eksportir udang, selain itu beberapa pengusaha eksportir udang merasa bahwa dengan tidak menggunakan GSP mereka masih tetap bisa melakukan ekspor produk udang ke Indonesia karena mereka sudah memiliki partner pengusaha / perusahaan importir di Amerika Serikat dan sudah memiliki perjanjian harga sebelumnya walaupun keuntungan yang didapat mungkin tidak akan sebesar jika mereka menggunakan fasilitas GSP. Namun bagi Indonesia, fasilitas GSP dari Amerika Serikat ini sangat menguntungkan dan pemanfaatan GSP harus dimaksimalkan selagi tidak melebihi *Competitive Need Limit* (CNL) yang ditetapkan oleh GSP.

## KESIMPULAN

Indonesia menikmati fasilitas GSP dari Amerika Serikat sejak tahun 1981, namun seiring dengan berjalannya fasilitas tersebut banyak dinamika yang terjadi seperti pada tahun 2013 – 2015 di masa pemerintahan Presiden Obama fasilitas GSP Amerika Serikat diberhentikan bagi semua negara berkembang yang menikmati fasilitas tersebut. Penghentian pada 2013 – 2015 tersebut salah satunya di latar belakang oleh salah satunya permasalahan HAKI, sehingga pada masa penghentian tersebut Indonesia harus membayar bea

masuk kepada Amerika Serikat menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) sehingga hal tersebut berdampak kepada cost produk ekspor Indonesia salah satunya adalah ekspor komoditas udang yang sebelum penghentian fasilitas GSP terus meningkat permintaannya, dengan meningkatnya cost ekspor udang Indonesia ke pasar Amerika Serikat tidak berdampak langsung terhadap volume ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat satu tahun setelah penghentian tersebut, namun terasa satu tahun setelahnya bahwa volume dan nilai ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat menurun. *Generalized System of Preferences* Amerika Serikat kepada Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengusaha / perusahaan eksportir Indonesia. Hal tersebut karena kurangnya sosialisasi mengenai manfaat penggunaan fasilitas GSP dan juga proses

atau persyaratan penggunaan GSP masih dirasa rumit untuk dipenuhi. Fasilitas GSP Amerika Serikat bagi Indonesia dirasa sangat penting, walaupun secara perdagangan Indonesia bisa beralih ke negara-negara lain yang memiliki akses pasar selain Amerika Serikat. Namun terdapat beberapa faktor mengapa Amerika Serikat menjadi prioritas perdagangan Indonesia dan Indonesia terus mempertahankan status penikmat GSP tersebut, hal itu disebabkan karena dengan adanya GSP ini diharapkan hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Indonesia akan semakin kuat, selain itu Amerika Serikat merupakan negara hegemony sehingga dengan diperkuatnya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dengan kerangka GSP ini diharapkan kedepannya akan mendorong berbagai kedekatan lainnya selain dalam bidang ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA Buku

- Bozyk, Pawel. *Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy*. Hampshire. Ashgate Publishing Limited. 2006
- Huala, Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada. 2006. hlm.109-110
- Yaumidin, Umi Karomah. *Perdagangan Asing dan Kebijakan Ekonomi Global* dalam buku *Standarisasi Produk Perikanan dan Olahannya dalam Penguatan Pasar Ekspor*. LIPI Press. 2016

#### Dokumen Insititusi

- American Chamber of Commerce in Indonesia. (2016). *Mendalami Hubungan Ekonomi Amerika Serikat – Indonesia*. Jakarta: [www.amchan.or.id](http://www.amchan.or.id).
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (2015). *Pemerintah Amerika Serikat Kembali Keluarkan Perpanjangan Gneralized System of Preferences*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (2015). *Rencana Strategis Perundingan Perdagangan Internasional tahun 2015 – 2019*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

#### Buletin, Jurnal dan Penelitian

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI (2018). *Antiipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika dan Perang Dagang Amerika vs China*. Buletin APBN. Vol. III, Edisi 13

#### Skripsi

- Aristiyani R. (2017). *Analisis Daya Saing Udang Indonesia di Pasar Internasional*. Bandar Lampung: Fakultas Pertanian Universitas Bandar Lampung
- Firdaus, E. (2013). *Regional Trade Agreement (RTA) dalam kerangka liberalisasi World Trade Organization (WTO): studi tentang liberalisasi perdagangan produk elektronik antara Indonesia-China setelah*

*pembentukan dan pelaksanaan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*. Indonesia: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum.

#### Website

CNN Indonesia (2019, Juni 13). AS Beri Waktu RI Penuhi Syarat Pembebasan Bea Masuk. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190613145829-92-403036/as-beri-waktu-ri-penuhi-syarat-pembebasan-bea-masuk>

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. (2015, Agustus 19). Pengurangan Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia ke Amerika Serikat dengan Skema Generalized System. Retrieved from *Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan*: <http://www.djpdspkp.kkp.go.id/artikel-941-pengurangan-bea-masuk-produk-perikanan-indonesia-ke-amerika-serikat-dengan-skema-generalized-system-.html>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Daftar Kerja Sama

Multilateral WTO. Retrieved from Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral : [https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman\\_list\\_lainnya/world-trade-organization-wto](https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto)

The Straits Times. (2018, July 7). Indonesia under US trade radar as Trump seeks to reduce deficits with trading partners. Retrieved from The Straits Times: <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-under-us-traderadar-as-trump-seeks-to-reduce-deficits-with-trading-partners>

#### Wawancara

Kepala Bagian Hukum dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI.

Kepala Bagian Kerja Sama Bilateral - Direktorat Jenderal Perundingan Internasional, Kementerian Perdagangan RI.

Executive Promotion – Asosiasi Pengusaha Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I)